

**PERAN DINAS PARIWISATA PADA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KELOMPOK SADAR WISATA PANTAI LOWITA
KABUPATEN PINRANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S1

Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Makassar

OLEH:

ADE SAFITRI

4518021050

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

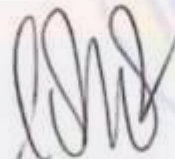
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Peran Dinas Pariwisata Pada Pengembangan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Ade Safitri
Nomor Stambuk : 4518021050
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (SI) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

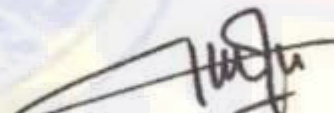
Menyetujui :

Pembimbing I



Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
NIDN. 0915098603

Pembimbing II



Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc
NIDN. 090128704

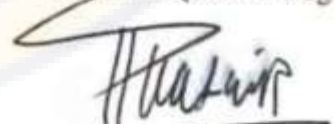
Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar




Dr. A. Burchabuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin Tanggal 06 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Peran Dinas Pariwisata Pada Pengembangan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang**

Nama : Ade Safitri
Nomor Stambuk : 4518021050
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

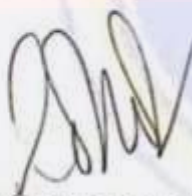
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

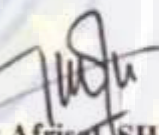
Makassar, 06 Februari 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian :


Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si Ketua


Dr. Ade Ferry Afrisal, SH., M.SC Sekretaris

Tim Penguji :

1. Ning Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
2. Dr. Ferry Afrisal, SH., M.SC
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si
4. Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si


.....)

.....)

.....)

.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Safitri
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas pariwisata Pada Pengembangan Kompetensi
Kelompok Sadar Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten
Pinrang

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli, rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal Terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini yang terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan saksi hukum berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 24 Februari 2023

Penulis

Ade Safitri
4518021050



ABSTRAK

ADE SAFITRI 4518021050, Peran Dinas Pariwisata Pada Pengembangan Kompetensi Masyarakat Sadar Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang (Dibimbing Oleh Nining Haslinda Zainal S.Sos. M.Si Dan Ade Fery Afrisal S.H. M.Sc). Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Bosowa Makassar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas pariwisata dalam mengembangkan potensi masyarakat sadar wisata pantai lowita. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi yang kemudian dilakukan oleh dinas pariwisata kabupaten pinrang dalam mengembangkan kompetensi masyarakat sadar wisata pada pantai lowita telah dilakukan secara optimal meskipun masih membutuhkan inovasi dimasa yang akan datang sehingga bisa masuk sebagai masuk 50 besar desa wisata menurut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif/ badan pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya dinas pariwisata pemuda dan olahraga yang dilakukan masih kurang dalam menjalankan peran serta dalam hal pengembangan kompetensi masyarakat sadar wisata. Pengembangan pariwisata pantai dan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sadar wisata maupun masyarakat sekitar wisata dalam meningkatkan wisata pantai lowita. Kesimpulannya, yaitu pengembangan peran dinas pariwisata pada pengembangan kompetensi masyarakat sadar wisata berpengaruh terhadap pengembangan wisata pantai lowita di kabupaten pinrang.

Kata Kunci : Peran, Pengembangan, Kompetensi, Masyarakat Sadar Wisata, Lowita.

ABSTRACT

ADE SAFITRI 4518021050, The Role Of Tourism Department In Competency Development Of Lowita Beach Aware Communities In Pinrang regency ((*Supervised by Nining Haslinda Zainal S.Sos. M.Si and Ade Fery Afrisal S.H. M.Sc*). Thesis, State Administration Study Program, Bosowa University Makassar.

The purpose of this research is to find out the role of the tourism agency in developing the potential of a community that is aware of lowita beach tourism. The type of research conducted is descriptive qualitative research using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study are that the strategy carried out by the Tourism Office of Pinrang Regency in developing the competence of tourism-aware communities on Lowita Beach has been carried out optimally even though it still requires innovation in the future so that it can enter the top 50 tourist villages according to the Ministry of Tourism and Creative Economy / tourism agency and the creative economy of the Republic of Indonesia.

The results of the study show that the efforts of the youth and sports tourism office are still lacking in carrying out participation in terms of developing the competence of a tourism-aware community. Development of beach tourism and government efforts to increase the participation of tourism-conscious communities and communities around tourism in increasing lowita beach tourism. In conclusion, the development of the role of the tourism agency in developing the competence of a tourism-aware community has an effect on the development of lowita beach tourism in Pinrang district.

Keywords: Role, Development, Competence, Tourism Awareness Society, Lowita

KATA PENGANTAR



Alhamudlillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya. Penulisan proposal berjudul “Peran Dinas Penikanan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Wisata Pantai Lowita Kabupaten Pinrang” ini merupakan syarat bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kesalahan atau kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun terhadap skripsi ini, agar dapat bermanfaat dikemudian hari.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis yakni M. Ali dan Ibu Hj.St.Rahmah.B yang selalu memberikan dukungan serta doa yang dipanjatkan untuk anaknya. Terimakasih atas didikannya selama ini kasih sayang yang tak pernah henti dan semangat yang selalu diberikan untuk anaknya sehingga bisa sampai di titik ini.

2. Prof. DR. IR. Batara Surya, S.T., M.SI selaku rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Arief Wicaksono, S. IP, Ma selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
5. Nining Haslindah Zainal, S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing 1 yang selalu bijaksana dalam membimbing selama proses bimbingan.
6. Ade Ferry Afrisal, SH.,M.SC selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan proposal berlangsung.
7. Pak Budi yang selalu mendukung dan memberikan solusi dalam proses administrasi yang dibutuhkan penulis.
8. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Irma, Zale, Ikram yang menjadi partner nongkrong.
10. Kepada bestieku Rau yang selalu kebersamai pada proses penelitian.
11. Kepada teman-teman ARASH18, HIMAN dan juga BEM KEMA FISIP terimakasih telah mendukung penulis untuk menyelesaikan yang seharusnya diselesaikan.
12. Kepada Keni dan Helmi terimakasih telah kebersamai selama setiap proses yang dilalui.

13. Kepada Yaya, Muke, Qila, dan Ocang partner Kampus Mengajar II terimakasih telah menyinggung tiap bulan progres skripsi.

14. Kepada Kakanda Amrudiat yang selalu memberikan semangat dan cinta kepada penulis.

15. Kepada segenap kakak dan adik-adik Kerukunan Mahasiswa Pinrang (KMP UNHAS) yang selalu mengerti disetiap keadaan.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku. Kata maaf dan ucapan terimakasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Allah SWT yang telah mendatangkan mereka dalam kehidupan saya.

Makassar, 3 Oktober 2022

Penulis

Ade Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan	7
2. Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Toeri Peran	9
B. Teori Pengembangan	14
1. Kemampuan Teknis	16
2. Teoritis	16
3. Konseptual	16

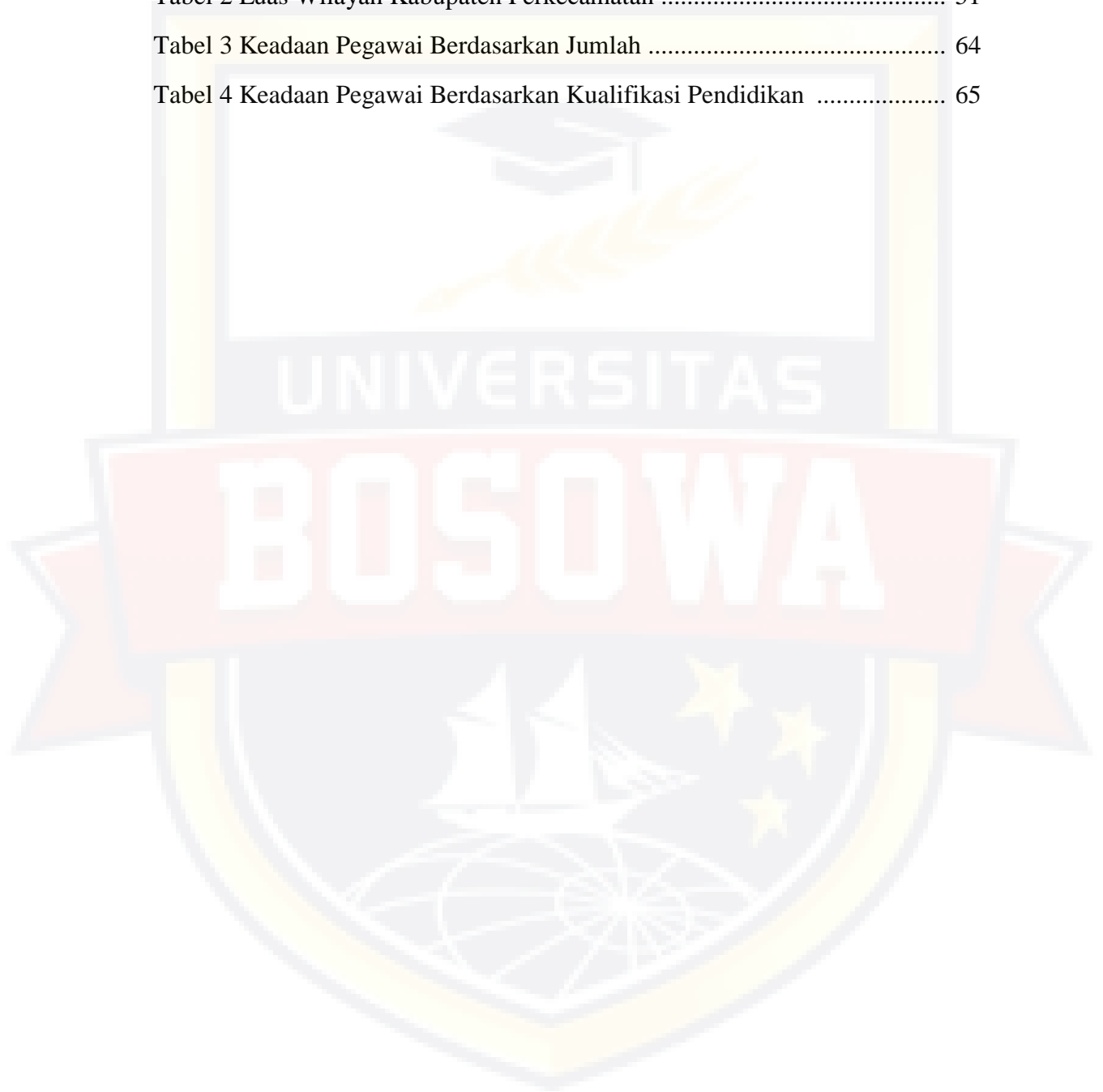
C. Teori Kompetensi	18
D. Teori Masyarakat Sadar Wisata	23
E. Teori Strategi	27
F. Penelitian Terdahulu	50
G. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan	41
D. Jenis Dan Sumber Data	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
a. Observasi	43
b. Wawancara	43
c. Studi Kepustakaan	43
F. Teknis Analisis Data	44
1. Pengumpulan Data	44
2. Reduksi	44
3. Sajian Data	45
4. Penyimpulan Dan Verifikasi Data	45
G. Deskripsi Fokus Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Profil Kabupaten Pinrang	47
2. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang	55
3. Profil Pantai Lowita	65
B. Pembahasan	68
1. Pengembangan	68

a. Kemampuan Teknis	72
b. Teoritis	75
c. Konseptual	76
2. Kompetensi	78
a. Pekerja Efektif	81
b. Kinerja Unggul	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

BOSOWA

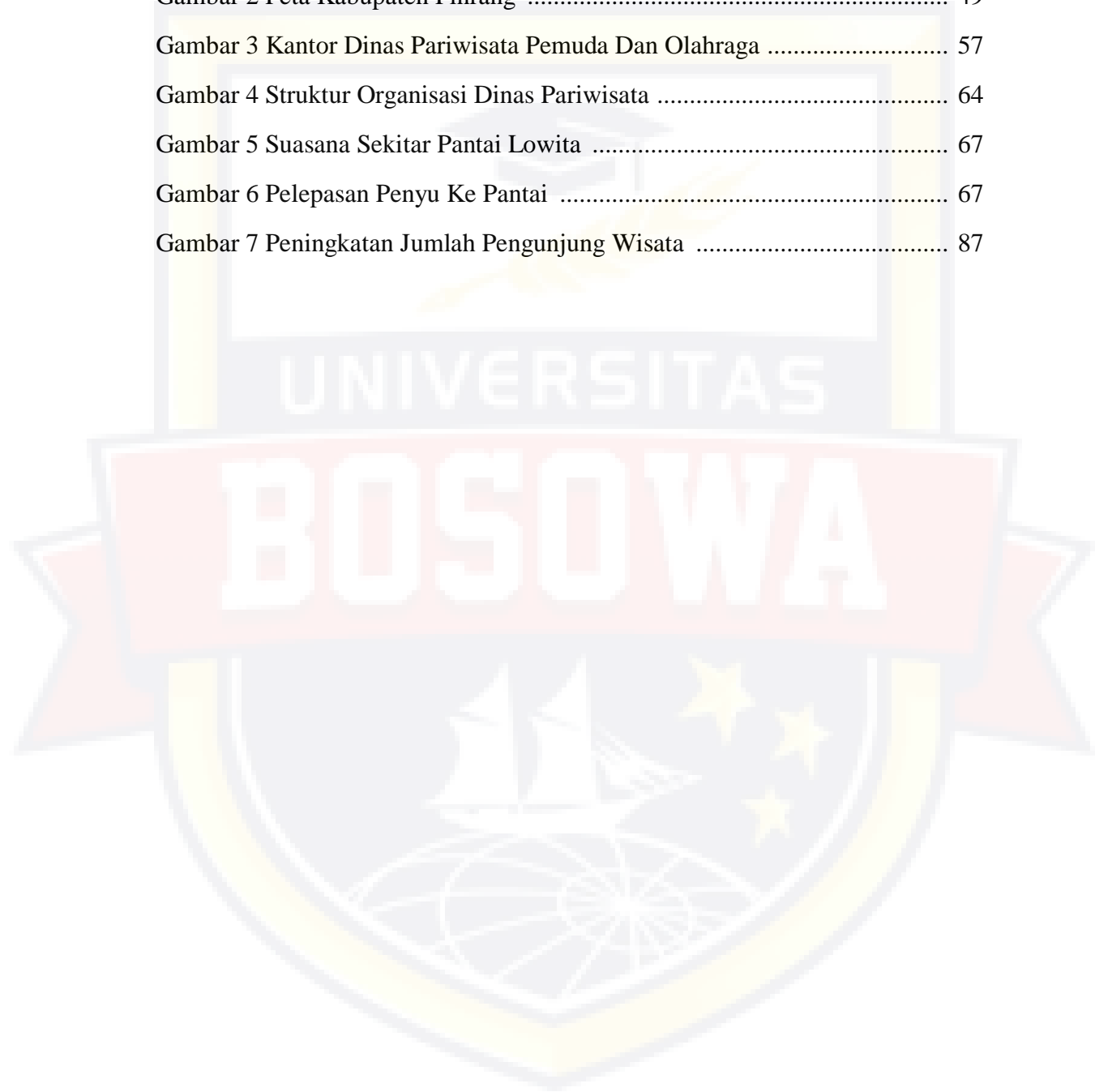
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2 Luas Wilayah Kabupaten Perkecamatan	51
Tabel 3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah	64
Tabel 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep	39
Gambar 2 Peta Kabupaten Pinrang	49
Gambar 3 Kantor Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	57
Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata	64
Gambar 5 Suasana Sekitar Pantai Lowita	67
Gambar 6 Pelepasan Penyu Ke Pantai	67
Gambar 7 Peningkatan Jumlah Pengunjung Wisata	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Lokasi Penelitian	94
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Dengan Informan	95
Lampiran 3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	96
Lampiran 4 Foto Lokasi Konservasi Penyu Pantai Lowita	97
Lampiran 5 Foto Bersama Perwakilan Pokdarwis	98
Lampiran 6 Tampilan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	99
Lampiran 7 Foto Izin Melakukan Penelitian	100
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	101
Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian	102

UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Dengan banyaknya pulau tersebut, berarti banyak pula daerah di Indonesia yang terletak dibagian pesisir atau pantai. Hal ini demikian dapat memberikan dampak baik terhadap daerah tersebut dengan hadirnya beberapa potensi pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan sekunder manusia dalam hal liburan. Perkembangan pariwisata setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, hal ini tergantung dari pemerintah daerah masing-masing dalam mengelolah potensi daerahnya. Pemerintah telah merencanakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan nasional secara terencana, bertahap dan berkesinambungan. Salah satunya yaitu pembangunan sektor pariwisata. Sektor ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena pariwisata merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam perekonomian negara.

Salah satu asas pemerintah daerah yakni desentralisasi menjadikan kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah, tanpa terkecuali juga dibidang pariwisata. Pemerintah memiliki kewenangan dalam pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan yang tertuang dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Pembangunan pariwisata sebagian bagian dari pembagunan daerah diarahkan pada umumnya diarahkan pada peran kegiatan sosial dan ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja, miningkatkan pendapatan masyarakat, serta

pendapatan asli daerah. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam mengembangkan destinasi pariwisata perlu diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat daerah sekitar wisata. Hal ini menjadi sangat wajar dikarenakan daerah wisata menjadi pilihan utama wisatawan lokal maupun manca negara. Bahkan saat ini, daerah wisata telah berkembang pesat menjadi primadona wisatawan meski hanya untuk sekedar menghabiskan waktu luang.

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan (Pasal 18 UU No. 11 tahun 2009 Tentang Kepariwisata). Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan melaksanakan program pengembangan pariwisata daerah masing-masing yang sejalan dengan undang-undang pemerintah daerah. Dari kebijakan tersebut, maka daerah berkesempatan dan berpeluang untuk menunjukkan potensi wisata yang dimiliki dan mengembangkan pariwisata demi meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dibentuknya dinas pariwisata merupakan salah satu bentuk nyata dari pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan pariwisata daerah. Dinas pariwisata kabupaten pinrang adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat dari pemerintah daerah kabupaten pinrang yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kepariwisataan daerah kabupaten pinrang berdasarkan ketentuan dan

peraturan yang berlaku. Adapun beberapa tugas-tugas pokok dinas pariwisata secara umum ialah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Mengoordinasikan pelaksana tugas di lingkungan dinas pariwisata sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana.
5. Merumuskan pembinan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal; dan
7. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang asset lingkungan hidup pariwisata.

Salain itu dinas pariwisata juga memiliki fungsi, beberapa fungsi diantaranya ialah:

1. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
3. Penyusunan program kerja dinas;
4. Pelaksanan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan daya Tarik wisata, kawasan strategis, industri dan ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata.

5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata; dan

6. Melaksanakan koordinasi bersama mitra kerja bidang destinasi pariwisata.

Dari beberapa tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan sebelumnya salah satu diantaranya ialah dinas pariwisata memiliki tugas dalam membina dan menyelenggarakan serta koordinasi pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Serta memiliki fungsi dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata.

Pasal 5 UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa “pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata”. Yang berarti bahwa pengembangan pariwisata setiap daerah harus memperhatikan potensi daerah masing-masing. Tanpa terkecuali kabupaten pinrang yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di sebelah 185 KM utara dari ibu kota provinsi Sulawesi selatan.

Pada 25 April 2022 kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menyelenggarakan salah satu program unggulan yaitu Anugerah desa wisata Indonesia 2022 yang memiliki tujuan untuk “mewujudkan desa wisata yang berkelas dunia, berdaya saing global dan berkelanjutan untuk Indonesia bangkit” (Sandiaga Salahuddin Uno, *Mentri Pariwisata dan Ekonomi kreatif 2020*)

mengumumkan 100 besar desa wisata Indonesia 2022 dari 34 provinsi dan wisata pantai lowita termaksud salah satu dari 6 (enam) wisata yang ada di Sulawesi Selatan menjadi desa wisata 100 besar tersebut. Namun tidak dapat masuk dalam 50 besar desa wisata disebabkan oleh beberapa penilainya yang tidak mencukupi kategori salah satu diantaranya ialah sumber daya manusia dan sumber daya alam yang masih kurang dan belum memadai.

Dinas pariwisata kabupaten pinrang memiliki visi “terwujudnya masyarakat sejahterah secara dinamis melalui harmonisasi kehidupan, akselerasi produktifitas kawasan, dan revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional” serta memiliki misi “Meningkatka apresiasi dan pengamalam nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagaimana nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh, Memperkokoh toleransi, solidaritas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai demokrasi, Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia, Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial, Memanfaatkan tata kelolah pemerintahan reformasi birokrasi, Mengembangkan kawasan andalan dan integritas pembangunan, dan Mengoptimalkan fungsi infrastruktur lingkungan hidup” (Dinas Pariwisata Pinrang).

Beberapa tantangan dibidang pariwisata :

1. Tantangan di bidang pariwisata adalah perkembangan pariwisata kabupaten pinrang yang belum mampu mengangkat citra pariwisata daerah ke tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam mendatangkan wisatawan mancanegara.

2. Daya Tarik wisata yang ada dari segi kualitas dan kuantitas masih perlu ditingkatkan untuk menambah minat wisatawan untuk berkunjung.
3. Kurangnya produk wisata yang ditawarkan seperti objek wisata pedesaan, ekowisata, agrowisata serta pertunjukan event/festival budaya dan pariwisata yang selama ini menjadi trend baru bagi wisatawan untuk berkunjung kesuatu destinasi wisata.
4. Informasi dan promosi pariwisata daerah masih kurang, khususnya dalam pelaksanaan promosi di tingkat nasional dan internasional terutama keikutsertaan dalam berbagai pameran yang bisa diikuti serta kurangnya pemanfaatan teknologi, informasi terutama pemanfaatan media elektronik.
5. Industri pariwisata di daerah belum berkembang, karena kurangnya minat sebagian pengusaha untuk berinvestasi di bidang pariwisata sehingga pertumbuhan sektor pariwisata belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pembangunan pariwisata daerah.
6. Kualitas SDM pelaku usaha pariwisata yang belum profesional dan perlu ditingkatkan dalam memberikan layanan kepada wisatawan sehingga tercipta rasa aman, nyaman dan kepuasan bagi wisatawan selama berkunjung. (RENSTRA DINSPAR 2019-2024).

Menarik dari semua yang telah disebutkan sebelumnya maka peneliti mengambil judul penelitian “Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Kompetensi Masyarakat Sadar Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang”.

B. Batasan Masalah

Dengan adanya batasan masalah yang digunakan dapat menghindari pelebaran atau penyimpangan agar masalah yang akan di teliti terarah serta

memudahkan sehingga tujuan awal yang telah direncanakan dapat tercapai. Dalam penelitian ini batasan masalah digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui proses serta kendala dalam peran dinas pariwisata yang berfokus pada kompetensi kelompok masyarakat sadar wisata pada wisata pantai lowita.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dinas pariwisata dalam pengembangan kompetensi masyarakat sadar wisata pantai lowita di kabupaten pinrang?
2. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sadar wisata pantai lowita di kabupaten pinrang?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui peran dinas pariwisata dalam pengembangan kompetensi masyarakat sadar wisata pantai lowita di kabupaten pinrang.
- b. Untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sadar wisata pantai lowita di kabupaten pinrang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, memberikan pengetahuan yang baru dalam hal wisata serta peran dinas pariwisata dalam pelestarian wisata pantai lowita yang ada di kabupaten pinrang.

- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi kajian, masukan dan sumbangan pemikiran terkhusus pengambilan kebijakan untuk merumuskan kebijakan serta upaya-upaya perlindungan, pengembangan dan pelestarian wisata pantai lowita di desa tassiwalie kecamatan suppa kabupaten pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Menurut Wulansari (2009, p. 106) “peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) “peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, jelasnya kata peran atau *role* dalam kamus *expord dictionary* di artikan: Actor’s part; one’s or function. Yang berarti aktor: tugas seseorang atau fungsi.

Istilah peran dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang yang diberikan suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut, karena itulah ada disebut *role expectation*.

Pengertian peran menurut para ahli adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, satu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.

Peran akan menjadi bermakna ketika peran itu dikaitkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang terjadi di masyarakat. Peran juga bisa dikatakan sebagai dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang terjadi di masyarakat. Peran juga bisa dikaitkan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang di mata masyarakat sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga negara yang baik berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peran sebagai warga negara.

Peran selalu berdampingan dengan suatu status dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam istilah saling membutuhkan, jika tidak ada peran dalam masyarakat tandanya juga orang tersebut tidak ada status kedudukan atau status, begitu pula sebaliknya. Karena manusia adalah makhluk sosial, setiap orang mempunyai beraneka peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, contohnya adalah peran

pendakwah pasti diberi wewenang oleh masyarakat untuk memberi ilmu agama di masjid-masjid atau majelis taklim di lingkungan masyarakatnya, sehingga peran menjadi seorang pendakwa berfungsi dan diakui di masyarakat sekitar. Namun perlu diingat, bahwa peran juga diatur oleh norma dan aturan masyarakat yang berlaku.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri terhadap masyarakat, dan peran diartikan sebagai proses. Peran juga sangat penting bagi seseorang diakui dan mempunyai harga diri. Adapun pengertian peran mencakup tiga hal antara lain: Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. Peran juga merupakan hal penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Sukanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya, berarti telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena peran sangat bergantung pada kedudukan, dan kedudukan pun bergantung pada peran.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian peran juga

diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat.

Selanjutnya menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harusnya bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan

suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. (Miftah Thoha, 1997).

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

B. Teori pengembangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Dan lebih dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya) (Sukiman, *pengembangan media pembelajaran: 222*). Pengembangan dapat pula dikatakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Pengembangan dapat berupa proses, produk dan rancangan.

Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses penghasilan bahan-bahan pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan memusatkan perhatian tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-

akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temua uji lapangan.

Pada hakekatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanaka secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menimbulkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbangan, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagaimana bekal atas prakasa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri kea rah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri (Iskandar Wiryokusumo, 2011).

Menurut Hasibuan (2011: 68) Pengembangan (*Development*) adalah proses operasional kedua dari manajemen personalia, pengembangan pegawai perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan pegawai.

Menurut *Nadler* (Hardjana, 2011: 11) pengembangan adalah kegiatan-kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinana untuk meningkatkan kinerja.

Hasibuan (2011: 69) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

1. Kemampuan teknis

Kemampuan teknis adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja. Kemampuan teknis yang dimaksud sebagai pegawai di dalam perusahaan harus mampu dalam penguasaan terhadap metode kerja yang ada atau yang telah ditugaskan. Artinya bahwa seorang karyawan mempunyai kemampuan teknis yang meliputi prosedur kerja, metode kerja dan alat-alat yang ada seperti yang telah dinilai dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga lebih maksimal.

2. Teoritis

Teoritis adalah identifikasi secara keseluruhan, tujuan manajemen sumber daya manusia dalam memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara bertanggungjawab secara strategis, etis dan sosial.

3. Konseptual

Konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan.

P.Siagian (2012: 254) menyatakan bahwa pengembangan (*development*) meliputi kesempatan belajar yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang diperlukan dalam pekerjaan yang sedang dijalani. Pengembangan lebih difokuskan untuk jangka panjang. Selanjutnya digunakan untuk

mempersiapkan karyawan sesuai dengan pertumbuhan dan perubahan organisasi.

Sikula (2010: 70) dalam *Hasibuan* mengatakan bahwa pengembangan pada masalah staff dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.

Simomara (2010: 287) menyatakan bahwa pengembangan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan pabilitas dan motivasi karyawan agar dapat menjadi aset perusahaan yang berharga, mengemukakan pengembangan biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik, berpendapat bahwa program pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam organisasinya. Jadi proses pengembangan dalam konteks perusahaan sagatlah berpengaruh pada kinerja juga tingkat produktivitas karyawan, dalam pemberian pendidikan kepada bagian-bagian manajerial dan pelatihan pada bagian operasional merupakan langkah kongkret yang harus direncanakan oleh perusahaan melalui top manajer dan harus berkesenambungan juga bermetode sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan. Dalam hubungan ini, sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “pengembangan mengacu pada masalah staf dan prsonalia adalah proses pendidikan jangka panjang dengan menggunakan pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”. Penelitian dan pengembangan adalah model penelitan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan (Indra Adi Budiman,2016: 467).

Makna pembangunan telah menjadi beban para sejarah politik kuno. Ini telah memperoleh beragam makna dan interpretasi dari berbagai ulama seperti Amartya Sen, Todaro, dll. Perkembangan ditentukan oleh Todaro dan Smith sebagai proses multi dimensi yang melibatkan perubahan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk membuat dan memperbaiki sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.

C. Teori Kompetensi

Kompetisi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Wibowo(2016, p271)

Menurut McClelland mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh

langsung terhadap, atau dapat mendeskripsikan, kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain kompetensi adalah apa yang para *outstanding performers* lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik, dari pada apa yang dilakukan para *average performers*. (Zainal, Veithzal Rivai, dkk. 2015, p.230).

Karakteristik Spener dalam Wibowo (2016, p.273) kompetensi terbentuk dari 5 (lima) karakteristik yaitu:

1. Motif

Sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.

2. Sifat

Karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi.

3. Konsep Diri

Sikap, nilai-nilai atau ciri diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.

4. Pengetahuan

Informasi yang dimiliki orang dibidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan

keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan.

5. Keterampilan

Kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termaksud berfikir analitis dan konseptual.

Menurut Emron, Yohny, Imas (2017, p.140) kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap.

Menurut George Klemp, dalam Yohny, Imas (2017), kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan pekerjaan yang efektif dan kinerja yang unggul.

1. Pekerjaan yang efektif adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi keterampilan.
2. Kinerja yang unggul adalah tolak ukur keberhasilan dimana seorang karyawan berhasil membebaskan serta memaksimalkan setiap endapan semua kemampuan.

Seiring perkembangan teknologi yang cepat pada setiap aspek kehidupan manusia maka setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Kompetensi merupakan kumpulan sumber daya manusia yang dinamis menunjukkan kapasitas intelektual,

kualitas sikap mental dan kapabilitas seseorang. Kompetensi merupakan modal awal yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Perkembangan kompetensi yang semakin luas dari sumber daya manusia memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia memegang peran penting dalam kesuksesan organisasi. Kompetensi merupakan salah satu factor yang membedakan seorang mampu menunjukkan kinerja optimal dengan seseorang yang tidak menunjukkan kinerja optimal.

Beberapa indikator kompetensi yang mempengaruhi suatu organisasi menurut Ruky dalam Fadillah, dkk (2017) , yaitu:

1. Karakter pribadi (*traits*)

Karakter pribadi adalah karakteristik fisik dan reaksi atau respon yang dilakukan secara konsisten terhadap suatu situasi atau informasi.

2. Konsep diri (*self concept*)

Konsep diri adalah perangkat sikap, sistem nilai atau citra diri yang dimiliki seseorang.

3. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang terhadap suatu area spesifik tertentu.

4. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan serangkaian tugas fisik atau mental tertentu.

5. Motivasi kerja (*motives*)

Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki oleh seseorang, yang selanjutnya akan mengarahkan, membimbing dan memilih suatu perilaku tertentu terhadap sejumlah aksi atau tujuan.

Kompetensi merupakan perpaduan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Mulyasa, 2013: 66). Menurut Wibowo (2007: 110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting.

Sedangkan menurut Veithzal (2003: 298) menyebutkan, kompetensi adalah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri yaitu kompeten yang berarti cakap, mampu, terampil. Kompetensi mengacu kepada atribut/ karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan.

Menurut Djaman satori (2007: 22) menyebutkan kompetensi bersal dari Bahasa Inggris *competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Jadi kompetensi adalah *performan* yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya.

Mudrajad Kuncoro (2005: 44) juga mengatakan kompetensi inti adalah nilai utama perusahaan/ organisasi dalam penciptaan keahlian dan kapabilitas yang disebarakan melalui bermacam garis produksi ataupun bisnis.

Moh.Uzer Usman (2006: 4) menyebutkan bahwa seseorang disebut kompeten apabila telah memiliki kecakapan bekerja pada bidang tertentu dari hal ini maka kompetensi juga diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif.

Kamus besar indonesai kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu), lingkaran kemampuan menguasai gramatika suatu Bahasa secara abstrak atau batiniah.

Kompetensi berdasarkan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan: pasal 1 (10), “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”.

Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu (www.wawan-junianto.blogspot.com).

D. Teori Masyarakat Sadar Wisata

Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) adalah lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya

kepariwisataa di wilayah desa mereka serta mewujudkan sapta pesona. Kepariwisataan ini diharapkan bakal meningkatkan pembangunan daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa.

Pada pasal 1 Permenbudpar Nomor PM.04/UM.0001/MKP/2008, sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagu tumbuh dan kembangnya kepariwisataa di suatu destinasi atau wilayah. Konsep ini tidak luput dari peran masyarakat. Merekalah yang merupakan pemeran utama dalam menciptakan kepariwisataan yang kondusif. Salah satu kunci keberhasilan pengembangna sector wisata adalah menciptakan masyarakat sadar wisata.

Menurut Teddy Antonuis, Camat Padang selatan, masyarakat sadar wisata merupakan masyarakat yang mengerti memahami bagaimana menjaga dan mengelolah suatu objek wisata sehingga pengunjung merasa betah dan nyaman. Hal ini dalam pembukaan acara sosialisai mengenai kesadaran wisata bagi kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Dengan adanya pokdarwis di setiap daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah wisatanya. Sehingga bukan hanya pokdarwis yang akan mendapat manfaat namun juga masyarakat di sekitar daerah itu sendiri.

Maksud dari pembentukan pokdarwis yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak,

serta komunikato dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi atau lokasi daya Tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- b. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan mafaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- c. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya Tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Fungsi kelompok sadar wisata secara umum dalam kegiatan kepariwisataan sebagai berikut:

1. Sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.

2. Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.

Lingkup kegiatan pokdarwis yang dimaksud disini adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan di laksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain:

1. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.
2. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
3. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya Tarik pariwisata setempat melalui upaya perwujudan Sapta Pesona.

Kelompok sadar wisata (Pokdarwis), adalah suatu lembaga di masyarakat yang memiliki beberapa anggota, terdiri dari para pelaku kepariwisataan harus mempunyai sifat yang bertanggung jawab dan empati serta memiliki peran sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan dan mafaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

E. Teori Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi bersal dari kata *Strategos* dalam Bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Statos* atau tentara dan *Ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses tujuan penentu rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan mejadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad (1995:31) “bahwa strategi

merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkatkan) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan”. Dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:

- a. Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- b. Arahannya harus bisa menentukan rencana, dan bukan sebaliknya.
- c. Strategi, harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- d. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- e. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
- f. Fleksibilitas adalah sangat esensial.
- g. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

Suatu strategi hendaknya mampu memberikan informasi kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap karyawan organisasi. Maka oleh Donnelly

(1996:109) dikemukakan ean informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu:

1. Apa, apa yang akan dilaksanakan
2. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa diatas
3. Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan strategi
4. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional strategi tersebut
5. Hasil apaa yang akan ddiperoleh dari strategi.

Untuk menjamin agar uoaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, Hatten dan hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- a) Strategi harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat.
- b) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.
- c) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain.

Organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.

- d) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatan dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahannya pesaing dan membuat langkah-langkah yang dapat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- e) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.
- f) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
- g) Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- h) Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan peran tentang “**Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata Pantai Lowita di**

Kabupaten Pinrang” saya selaku penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang pada dasarnya memiliki tema yang sama yaitu terkait dengan peran dinas pariwisata. Yang dimana dianggap cukup penting, karena sekaligus untuk mengetahui dan memahami perbedaan ataupun kesamaan penelitian terdahulu dan sekarang.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul & tahun penelitian	Hasil penelitian
1	Andi Muhammad Romi	Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Pantai Bahari Di Kabupaten Bone (2020)	Peran dinas pariwisata dalam pengembangan wisata bahari ditinjau dari kebijakan dan perumusan dan rencana program berjalan baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, selain itu program tersebut dibawah rencana strategis yang akan dijalankan oleh dinas pariwisata 5 tahun ke depan. Pengembangan destinasi wisata bahari di kabupaten bone sudah sesuai dengan perencanaan yaitu pembangunan prasarana wisata Palette dengan melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana.

			<p>Penambahan fasilitas dengan pengadaan fasilitas baru. Pengembangan pemasaran wisata bahari di kabupaten bone sudah sesuai dengan perencanaan yaitu analisis pasar untuk promosi dan pemasaran dilakukan dengan melihat kondisi saat ini, yang menggunakan sosial media internet dan aplikasi media sosial dalam pariwisata termasuk wisata bahari, pelaksanaan dan luar negeri dilaksanakan dengan ikut serta dalam acara pameran pariwisata nusantara di Bali, Jakarta, Kalimantan, Belanda, dan Rusia pada tahun 2018-2019. Kedua faktor yang mempengaruhi Pengembangan Wisata Bahari meliputi Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Potensi pantai, laut dan Media Sosial, sedangkan faktor penghambat yakni Regulasi</p>
--	--	--	---

			lokasi dan Jumlah destinasi.
2	Bima	Peran Dinas dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata pantai bandengan di kabupaten jepara (2017)	Pegenmabangan daerah wisata yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan yakni melalui pengembangan sumber daya manusia yang didialnya terdapat pendidikan dan pelatihan bahasa inggris, <i>study banding</i> , pelatihan guide, pengelolaan <i>homestay</i> dan lainnya, pengembangan produk wisata dengan pembangunan sarana dan prasarana yang ada, pengembangan pasar dan pemasaran dengan manmbah media informasi berbasis <i>website</i> dengan <i>image promotion</i> serta pengembangan kelembangaan dengan membentuk kelompok sadar wisata obyek wisata pantai Bandengan. Serta . Pelaksanaan pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan membawa dampak sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakt daerah

			<p>wisata Pantai Bandengan. Dampak sosial tersebut meliputi pola pikir masyarakat, perilaku masyarakat dan kepercayaan diri masyarakat. Sedangkan dampak ekonomi yang dialami adalah meningkatnya pendapatan masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan. Dan Kendala yang dialami oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal ini berupa terbatasnya anggaran dan masih minimnya tenaga ahli Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan kendala eksternal dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat menjadi kendala utama dalam</p>
--	--	--	--

			pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan.
3	Kusmalina	Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Mengelolah Sector Pariwisata Di Kecamatan Sirombu Kabupten Nias Barat	<p>Peranan dinas pariwisata dan kebudayaan mengelola sector pariwisata pantai di kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Fasilitator Dalam rangka melaksanakan peranannya sebagai fasilitator, Dinas Pariwisata mewujudkannya dengan cara menyediakan fasilitas sarana prasarana di objek wisata, memberikan fasilitas kepada para investor dan pengusaha wisata berupa kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi serta menguntungkan pihak investor dan pengusaha wisata, memasarkan objek wisata, memfasilitasi

			<p>kelompok masyarakat sadar wisata agar mendapatkan dana stimulant, dan lain sebagainya.</p> <p>2. . Sebagai Motivator Dinas Pariwisata sebagai salah satu stakeholder pariwisata di Nias Barat dibutuhkan peranannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor dan pengusaha wisata. Pentingnya kesadaran masyarakat Kabupaten Nias Barat terhadap pariwisata menuntut peranannya Dinas Pariwisata agar terus memberikan motivasi, baik itu berupa sosialisasi, pelatihan maupun dana stimulant.</p> <p>3. Dinamisator Sebagai upaya</p>
--	--	--	---

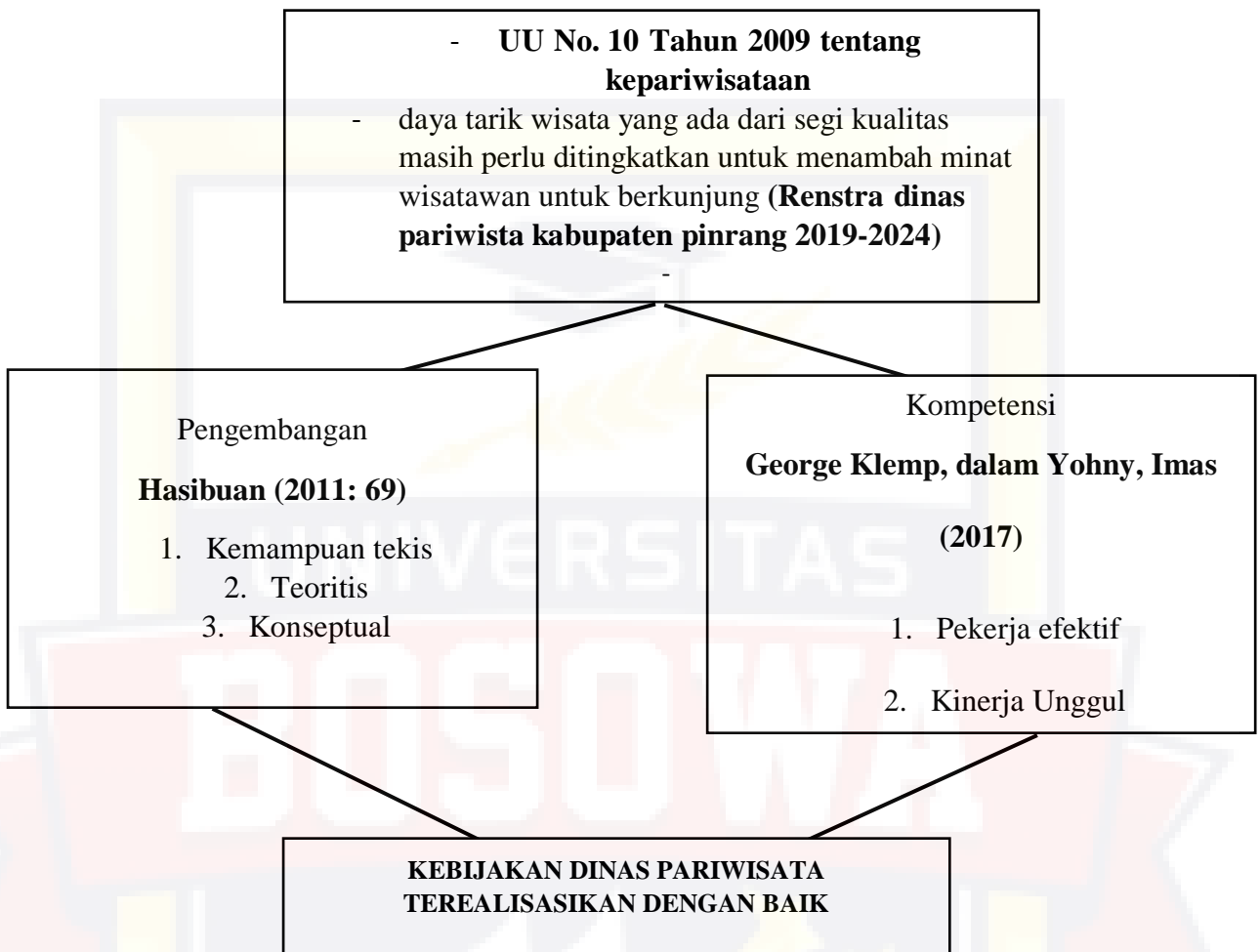
			<p>dinamisasi antar stakeholder pengembang pariwisata di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, Dinas Pariwisata selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerjasama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Upaya dinamisasi ini utamanya diwujudkan melalui dialog pada saat penyelenggaraan event promosi wisata, dialog pada saat sosialisasi dan pelatihan pada masyarakat, serta peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Pekerjaan Umum</p>
--	--	--	---

			sebagai penyedia sarana prasarana umum penunjang kebutuhan pengembangan pariwisata.
--	--	--	---

G. Karangka Konseptual

Karangka konseptual merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek suatu penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah diuraikan sebelumnya atau bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasikan dengan masalah penting (Sugiyono, 2013, p. 91). Berikut ini dikemukakan karangka yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis. Peran dinas pariwisata dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat serta pendampingan pengembangan sumber daya manusia setempat untuk memberikan akses kepada masyarakat.

Tujuannya untuk mengurangi populasi pengangguran pada masyarakat setempat, dan menunjang kreatifitas masyarakat setempat dalam pemberdayaan sumber daya alam maupun manusia yang dapat di tingkatkan.



Gambar 1

Karangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan bersikap deskriptif guna menggambarkan dan mengetahui keadaan nyata yang hendak dinilai dapat memudahkan peneliti mendapat data objektif dan mengetahui Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Pantai Lowita di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwasanya metode penelitian kualitatif itu digunakan dalam meneliti keadaan objek alamiah dan instrument kuncinya adalah peneliti itu sendiri, triangulasi atau gabungan dijadikan Teknik pengumpulan data, kemudian hasil dalam penelitian lebih menekan pada arti generalisasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric di balik fenomena secara dalam, rinci dan tuntas (Sugiyono, 2013: 1). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai suatu pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan hasil penelitian.

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan keseluruhan ada saja yang ada di lapangan (Hikmat, 2011). Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Hal ini bertujuan memaparkan temuan secara fakta, akurat dan sistematis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pirang dan Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini diambil karena peneliti melihat daerah tersebut memiliki potensi yang baik dalam hal wisata namun kekurangan kesadaran untuk menjaga kearifan lokal karena pergeseran teknologi dan budaya sangat cepat.

C. Informan

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa sanya informan ditentukan oleh peneliti dengan cara tertentu dengan mempertimbangkan akan mendapatkan keperluan data yang dibutuhkan, kemudian informasi atau data yang didapat dari orang tersebut/informan kemudian peneliti mempertimbangkan atau menetapkan memberikan data lebih lengkap.

Informan dipilih dengan cara *purposive sampling*, karena menganggap bahwa informan yang ditunjuk memiliki informasi yang dibutuhkan dengan tujuan dan maksud tertentu peneliti melakukan penarikan sampel secara subjektif.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang menganggap bahwa informan yang dipilih tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berikut informan dalam penelitian:

- 1) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang.
- 2) Kepala subbagian Pengembangan SDM Wisata Lowita Dinas Pariwisata.
- 3) Kelompok sadar wisata pantai lowita kecamatan suppa.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Lofland dan Moleong (2012) menjelaskan bahwa data yang didapatkan langsung oleh peneliti pada saat berada dilapangan. Data primer dalam hal ini didapatkan dari informan pada saat wawancara secara langsung/tatap muka.

b. Data Sekunder

Lofland dan Moleong (2012) menjelaskan untuk melengkapi data penelitian atau informasi yang didapatkan dari data primer dibutuhkan data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Didalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan alat bantu yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan data terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Dedi Mulyana (2003: 168) pengamatan dianggap cocok untuk meneliti bagaimana manusia berperilaku dan memandang realitas kehidupan mereka dalam lingkungan mereka yang biasa, rutin dan alamiah.

b. Wawancara

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2016, p. 137).

c. Studi Kepustakaan

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sugiyono, 2013, p. 80). Studi literature adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian yang penelahan

terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal berkaitan dengan focus penelitian merupakan sumber data yang penting dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2016, p. 333-335). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2016, p. 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dari sumber data melalui teknik wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan dalam wawancara dapat langsung dianalisis oleh peneliti. Apabila jawaban yang diperoleh belum memuaskan atau belum cukup, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi sampai data dianggap valid.

2. Reduksi

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun

penambahan data yang dirasa masih kurang. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2016, p. 247).

3. Sajian Data

Sajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data maka dapat membantu untuk memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan suatu pada analisis ataupun tinakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Miles Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif” (Sugiyono, 2016, p. 249).

4. Penyimpulan dan Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam bentuk teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang ditemukan bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak diikuti dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti valid dan konsisten saat

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibenl atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2016, p. 252).

Dalam lpenelitian kualitatif, kesimpulan yang dapat kemungkinan dapat menjawab focus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatf sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Moleong (2012) menjelaskan bahwa focus penelitian adalah acuan dalam pengambilan data informasi pada permasalahan penelitian dengan cara konsisten pada tujuan dan masalah, sehingga menjadi pedoman dalam memaparkan temuan di lapangan.

Karenanya penelitian ini akan mengarah pada pengembangan salah satu wisata pantai di kabupaten Pinrang. Wisata yang dimaksud yakni Wisata Pantai Lowita di desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Peneliti akan fokuus pada penelitian proses pengembangan wisata tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi selatan, Indonesia tanggal berdiri kota pada tanggal 28 Januari 1960 berdasarkan dasar hukum No.UP-7/3/5-392. Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 KM utara ibu kota provinsi Sulawesi selatan, berada pada posisi $3^{\circ}19'13''$ sampai $4^{\circ}10'30''$ lintang selatan dan $119^{\circ}26'30''$ sampai $119^{\circ}47'20''$ bujur timur. Secara administrative, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 36 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah Kabupaten Pinrang adalah sebelah utara dengan kabupaten Tanah Toraja. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah barat kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar. Sebelah selatan dengan kota Parepare. Dengan luas wilayah kabupaten mencapai 1.961,77 km².

Mengenai asal pemberian nama pinrang yang berkembang di pinrang sendiri.versi pertama menyebutkna pinrang berasal dari Bahasa bugis yaitu kata "*benrang*" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti rawa-rawa. Hal ini disebabkan pada awalnya pembuka daerah pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paletange, bebas dari pengasinan dari kerajaan gowa. Kedatangannya

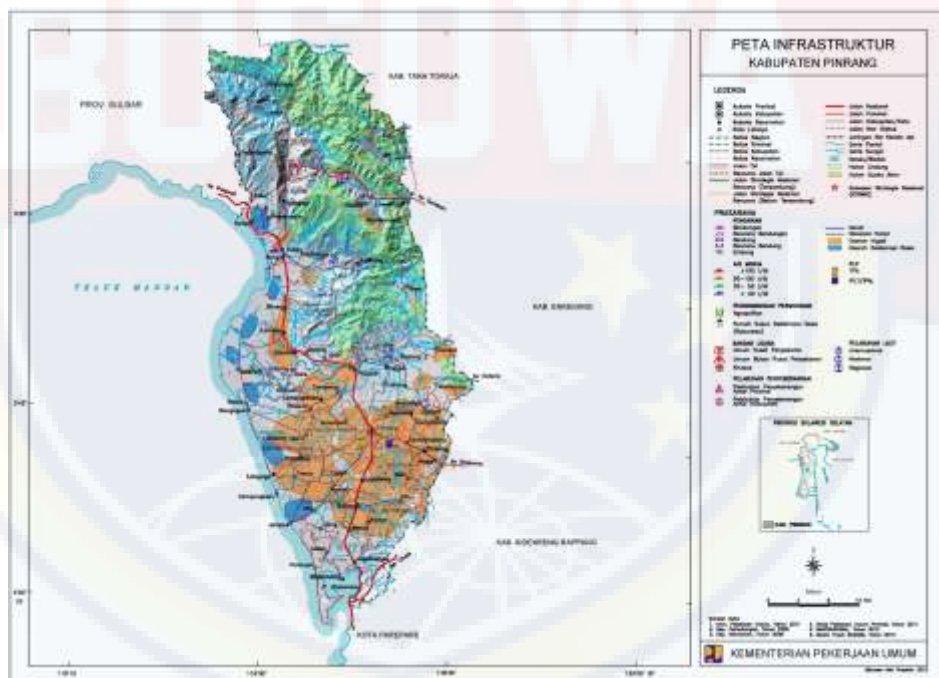
disambut gembira namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata “*pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*” yang berarti “berubah saja mukanya tuan kita dari Gowa”. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang berarti berubah, kemudian lambat laun menjadi kata Pinrang.

Sumber lain mengatakan pemukiman pinrang yang dahulu rawa selalu tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas genangan air, dalam Bahasa bugis disebut “*pinra-pinra onroanna*”. Setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberikan nama; *Pinra-pinra*.

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari *Onder Afdeling* pinrang yang berada dibawah *Afdeling* pare-pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan *Massenrengpulu* (Kassa dan Batulappa) dan *Ajatappareng* (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya *Onder Afdeling* Pinrang pada zaman penduduk jepang menjadi Bunken Kanrikan pinrang dan pada zaman kemerdekaan menjadi kabupaten pinrang.

Kemudian setelah proklamasi Republik Indonesia bersama dengan kerajaan di Sulawesi selatan Kerajaan Batulappa, Kerajaan Sawitto, Kerajaan Suppa dan Kerajaan Kassa dan juga 4 kerajaan-kerajaan ini merupakan kerajaan utama (Arung Tungke/Pemerintahan Tunggal) di wilayah pinrang kemudian menyatakan bergabung kedalam Republik

Indonesia, dan daerah-daerah di Indonesia yang masih berbentuk monarki menjadi dan diteruskan status sebagai daerah swaptaraja atau pemerintahan sendiri di tahun 1945-1960. Kawedanaan pinrang meliputi 4 swaptaraja yakni Swaptaraja Batulappa berpusat di Bungi, Swaptaraja Sawitto berpusat di Sawitto, Swaptaraja Suppa berpusat di Majennang, Swaptaraja Kassa berpusat di Bialajeng. Pada masing-masing Arung dan penguasa swaptaraja merupakan keturunan bangsawan kasta tinggi (Arung/Datu) dari dinasti yang memerintah kerajaan masing-masing menggunakan gelar raja yang berbeda-beda, seperti Arung/Datu (Raja/Ratu) dan Addatuang (Yang Bertuan).



Gambar 2 Peta Kabupaten Pinrang

Dengan demikian pengertian nama pinrang berasal dari istilah “Pinra” adalah adanya dinamika sosial dan masyarakat sepanjang sejarah, baik dari segi maupun tatan nilainya (www.pinrangjab.go.id)

Wilayah administrasi kabupaten pinrang terbagi dalam kecamatan 12 kecamatan dan 108 Desa/Kelurahan (39 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km². dengan jumlah penduduk sebanyak 388.119 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 192 jiwa/km² (Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2020)

Kabupaten pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada tahun dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung kabupaten pinrang sebagai daerah potensial untuk sector pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0-500 mdpl(60,40%), ketinggian 500-1000 mdpl (19,69) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90).

Berdasarkan Badan Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang secara administrative meliputi 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 69 desa. Pembagian wilayah menurut kecamatan, jumlah kelurahan dan desa serta luas kecamatan sebagai berikut.

Tabel 2 Luas Wilayah Kabupaten perkecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas
Suppa	2	8	74,2
Mattiro Sompe	2	7	96,99
Lanrisang	1	6	73,01
Mattiro Bulu	2	7	132,49
Watang Sawitto	8	-	58,97
Paleteang	6	-	37,29
Tiroang	5	-	77,73
Patampanua	4	7	136,85
Cempa	1	6	90,3
Duampanua	5	10	291,86
Batulappa	1	4	158,99
Lembang	2	14	733,09
Jumlah/Total	39	69	1961,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang 2021

Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 Kabupaten Pinrang dianggap sebagai perangkat daerah otonomi sekaligus tanggal berdirinya Kabupten Pinrang, berikut nama Bupati pinrang dari masa ke masa:

1. H. A. Makkoelaoe (1960-1964)
2. H. A. Gazaling (1964-1965)

3. H. A. Dewang (1965-1968)
4. Drs. H. M. Daud Nompo (1968-1969)
5. Lektol H. A. Patonangi (1969-1980)
6. H. Rapiuddin Hamarung S.H (1980-1981)
7. Drs. H. Natsir Isa (1981-1982)
8. Kolonel Inf. H. Musa Gani (1982-1986)
9. Brigjen TNI H. Zainal Basri Palaguna (1986-1986)
10. Kolonel Inf. H. U.S. Anwar (1986-1991)
11. Kolonel Inf. H. A. Firdaus Amirullah (1991-1998)
12. Drs. H. Masnawi A.S (1998-1999)
13. Drs. H. A. Nawir (1999-2009)
14. H. Andi Aslam Patonangi (2009-2019)
15. H. Andi Irwan Hamid S.Sos (2019-2024)

Berdasarkan *draft* Rancangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 dikemukakan visi kabupaten pinrang sebagai berikut “***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang Yang Sejahterah , Religius, Hamonis, Mandiri Dan Tangguh Mengelolah Potensi Daerah***”. Rumusan visi ini memiliki relevansi signifikan dengan visi RPJMD Kabupaten Pinrang, khususnya dalam penekanan pada terwujudnya kemajuan, kemandirian dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Rumusan visi ini juga dimiliki konsisten dengan visi RPJDM Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dimana pokok visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif).

Adapun kandungan dari lima pokok visi tersenut adalah sebagai berikut:

1. Sejahtera adalah kondisi masyarakat kabupaten pinrang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup. Ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang rendah, pendapatan masyarakat yang tinggi, derajat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, akses pelayanan public yang mudah.
2. Religius adalah kondisi masyarakat kabupaten pinrang yang didalamnya atmosfer kehidupan kerohanian berkembang. Ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta memanifestasikan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.
3. Harmonisasi adalah kondisi masyarakat yang hidup tenang. Ini ditandai dengan terpeliharanya ketertiban, ketenangan dan kenyamanan hidup masyarakat berlandaskan kebersamaan dan toleransi serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.
4. Mandiri adalah kondisi masyarakat yang memiliki prakasa dalam mewujudkan keberdayaan. Ini ditandai dengan kuatnya keswadayaan, semangat gotong royong dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan ekologi.
5. Tangguh mengelola potensi daerah adalah gambaran tentang kuatnya kesungguhan pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah pada sector pertanian dalam arti luas sector

potensi lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun rumusan RPJMD kabupaten pinrang 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan di dukung oleh teknologi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Memperkuat peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
5. Melanjutkan, mengembangkan, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana public, terutama di wilayah pegunungan pinrang utara.
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung kabupaten pinrang sebagai poros utama pemenuhan pangan nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi

Sejumlah Komoditas Ungulan (Sumber Rancanfan Renstra Sekretariat Daerah Kab.Pinrang 2019-2024).

Kabupaten pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93km, sehingga berpotensi memiliki pariwisata pantai. Wisata pantai yang ada beberapa dikabupaten pinrang diantaranya:

1. Permandian Air Panas Sulili
2. Pantai Lowita
3. Pantai Harapan Ammani
4. Pantai Dewata Wakka

Salah satu objek wisata yang sangat diminati wiisatawan terkhususnya menjadi tempat wisata masyarakat kabupaten pinrang iyalah pantai lowita yang terletak di Desa Tassiwalie kecamatan suppa yang berjarak 28 km dari pusat kota.

2. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang

Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten pinrang sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk pada tahun 2016 dan efektif berlaku pada tahun 2017 berdasarkan peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Taahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas dan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terbentuknya dinas pariwisata pemuda dan olahraga sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dianggap sebagai sesuatu hal

yang strategis dalam meningkatkan dan mempercepat kemajuan pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. Dimana sebelumnya urusan pemuda dan olahraga ditangani oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sedangkan urusan bidang pariwisata dinaungi oleh dinas sosial, kebudayaan dan pariwisata.

Ditinjau dari aspek strategis keberadaan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan dua urusan yaitu urusan pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan dua urusan yaitu urusan pemerintahan wajib diselenggarakan terkait dengan pelayanan dasar (Basic Service) bagi masyarakat sedangkan urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan adalah urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (Core Competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Adapun tugas pokok dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten pinrang sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diserahkan oleh bupati kepadanya.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, dinas pariwisata pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menjalankan perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
3. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 3 Kantor Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

Pariwisata kabupaten pinrang memiliki visi “terwujudnya masyarakat sejahterah secara dinamis melalui harmonisasi kehidupan, akselarasi produktifitas kawasan, dan revitalisasi peran poris utama pemenuhan pangan nasional”. Serta memiliki beberapa misi iyalah:

- a. Meningkatkan apresiasi dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagaimana nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
- b. Memperkokoh toleransi, soliditas, kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi.
- c. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan kemakmuran ekonomi kesejahteraan sosial.
- e. Memanfaatkan tata kelola pemerintahan reformasi birokrasi.
- f. Mengembangkan kawasan andal dan integrasi pembangunan.
- g. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur lingkungan hidup.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan tersebut mengamanatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana

Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tingkatan dan berfungsi sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 tahun ke depan.

Untuk itu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Pinrang menyusun Renstra Tahun 2019 – 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja.

Renstra dinas pariwisata, pemuda dan olahraga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi, misi daerah sebagaimana telah diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kabupaten Pinrang tahun 2019 – 2024 ini disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada regulasi dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang dimaksud meliputi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kabupaten Pinrang 2017 -2019 serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi

Selatan dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hal tersebut maka dinas, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten pinrang bersama-sama dengan para pejabat structural dan staf menyusun Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024, yang merupakan perencanaan lima tahunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di kabupaten pinrang. Selanjutnya, Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan rencana strategis dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten pinrang tahun 2019 – 2024, peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

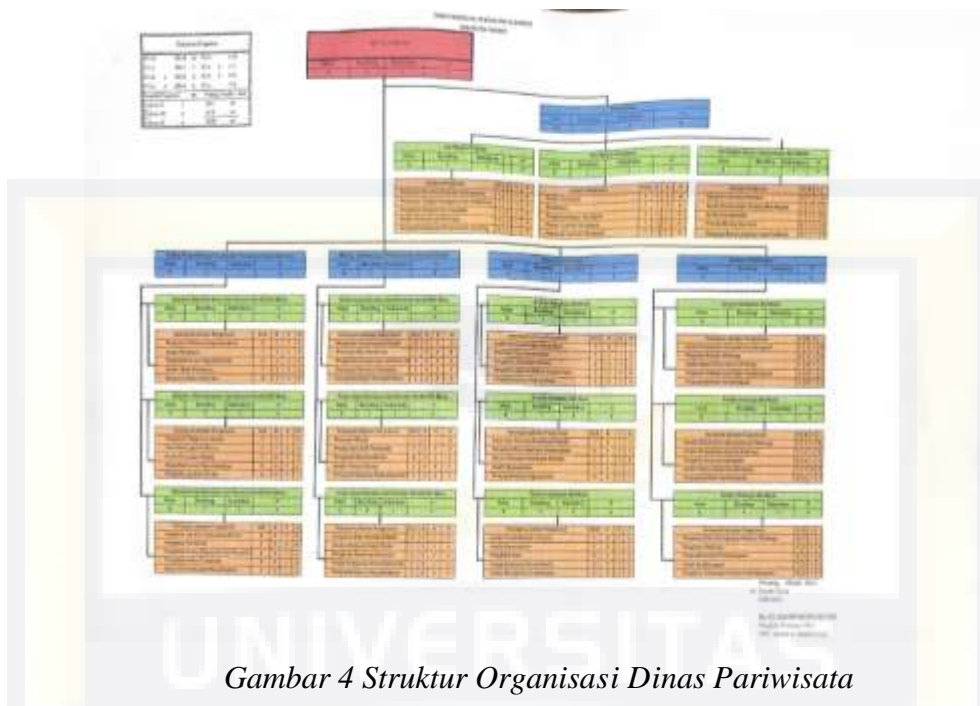
- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotismen.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Permerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksna Rencana Pembangunan Daerah.

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- p. Peraturan Menteri Pariwisata Republic Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2019 – 2024.
- q. Peraturan Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2019 – 2024.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor .. Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 – 2019.
- s. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga.
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2030.

Dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang yaitu Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas. Berdasarkan peraturan tersebut maka susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Secretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran Kepariwisata terdiri atas:
 1. Seksi Sarana Pariwisata
 2. Seksi Promosi Dan Investasi, Dan
 3. Seksi Penyuluhan Dan Perjalanan Wisata.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi bimbingan dan pelatihan
 2. Seksi kerjasama wisata
 3. Seksi peran serta masyarakat.
- e. Bidang Kepemudaan, Terdiri Atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda,
 2. Seksi Pengembangan Pemuda, Dan
 3. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda.
- f. Bidang Keolahragaan, Terdiri Atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Olahraga
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
 3. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Olahraga
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

Potensi Sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah organisasi sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Karena kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dikerjakan berikut sumber daya aparatur yang dimiliki pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang akan diuraikan sebagaimana tabel dan diagram dibawah ini:

Tabel 3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

Status pegawai	Jenis kelamin		Jumlah
	Lak-laki	Perempuan	
Pegawai Negeri Sipil / PNS	27	15	42
Honorer	1	9	10
Total	28	24	52.

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

Tabel 4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SLTP / Sederajat	0
SLTA / Sederajat	15
D3 (Diploma)	0
S1 (Sarjana)	24
S2 (Pascasarjana)	3
Total	42

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

3. Profil Pantai Lowita

Pantai lowita diambil dari singkatan dari tiga nama desa di Suppa, yaitu Desa Lotang Salo, Wiringtasi dan Tassiwalie. Pantai lowita memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya itu, di sana pengunjung bisa menghabiskan waktu bersama keluarga.

Wisata pantai lowita di Pinrang Sulawesi selatan adalah salah satu tempat wisata yang berada di Tassiwalie, Suppa, kabupaten Pinrang 91272. Objek wisata pantai lowita di pinrang Sulawesi selatan adalah tempat wisata yang ramai wisatawan pada hari libur maupun hari biasa. Tempat ini memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari. Wisata pantai lowita memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi.

Pantai lowita, yang berjarak 28 km dari pusat kota. Tidak hanya di akhir pekan atau musim libur saja, pantai lowita tetap ramai dikunjungi di hari hari biasa. Salah satu alasannya ialah karena pemandangan pantai yang begitu mempesona, memberikan panorama

yang tidak akan membuat kecewa. Pengunjung yang datang berwisata ke tempat ini juga berasal dari berbagai daerah. Dalam berbagai aspek, dapat diketahui pula bahwa kawasan pantai ini terus dibangun dari berbagai bidang. Tentu dengan pembangunan yang dilakukan akan menjadi destinasi wisata populer di Sulawesi selatan tersebut semakin nyaman untuk dikunjungi. Saat pertama kali masuk ke area pantai, masih terasa suasana pantai yang masih begitu terjaga. Tentu hal ini tidak jauh dari peran berbagai pihak yang ada di baliknya.

Di sepanjang bibir pantai, terdapat jajaran pepohonan kelapa yang menambah eksotis destinasi wisata pantai lowita. Objek wisata ini menjadi wisata favorite bagi para wisatawan akses jalan menuju ke destinasi wisata ini juga terbilang sangat memadai. Dengan kondisi tersebut akan menjadikan perjalanan wisatawan lancar sampai tujuan.

Terkadang masih banyak yang menduga berwisata ke pantai hanya dapat melakukan kegiatan berenang saja. Namun jika dilihat lebih jauh, terdapat banyak kegiatan seru dan menyenangkan saat berkunjung ke pantai lowita yang ada di daerah pinrang ini, salah satunya mencari kerang di antara hamparan pasir serta melihat pembudidayaan penyu juga ada di pantai ini.

Objek wisata kebanggaan pinrang ini, memberikan nuansa yang masih asri dan terjaga. Suasana yang nyaman inilah yang membuat wisatawan mengunjungi pantai ini. Jauh dari keramaian yang membuat dapat menikmati deburan ombak lengkap dengan hembusan angin

pantai yang menenangkan. Pantai lowita memang sangat cocok untuk escape dari rutinitas dan menghilangkan segala rasa penat sebentar.



Gambar 5 Suasana Sekitar Pantai lowita

Pantai lowita juga memiliki tempat perkembangbiakan penyu yang dapat dikunjungi, untuk menyaksikan secara dekat bagaimana tukik, sebagai anak penyu dilepas ke laut. Aktivitas pelestarian penyu jenis lekang yang ada di pantai lowita tersebut dikerjakan secara mandiri oleh kelompok pemuda setempat yang tergabung dalam kelompok konservasi madani.



Gambar 6 Pelepasan Bayi Penyu Ke Pantai

B. Pembahasan

1. Pengembangan

Pada kenyataannya tugas dan fungsi peran dinas pariwisata Indonesia masih perlu dipertanyakan, buktinya masih muncul keluhan dari pengunjung wisatan seperti kurangnya fasilitas yang disediakan, kepekaan masyarakat setempat serta etika kerja secara moral masyarakat setempat (*Skripsi Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Membina Etika Kerja Pemandu Wisata Di Kota Sabang Oleh Risca Fitra Ramadhana 2021*). Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, terkandung pengusaha objek dan daya Tarik wisata beserta usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Objek dan daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Adapun unsur-unsur pariwisata sebagai berikut yaitu:

- a. Akomodasi. Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, tempat *smohe stay*, pondokan, wisma tempat berkemah waktu liburan) dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas.
- b. Fasilitas pelayanan penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan

(pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lainnya), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan.

- c. Infastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infastruktur secara tidak langsung juga mmeberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastuktur transfortasi.
- d. Jasa boga dan restoran, industry jasa di bidang penyelenggaraan makan dan minuman yang dikelolah secara komersial.
- e. Attraksi wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.
- f. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
- g. Cindramata (csouvenir), benda yang dijadikan kenang-kenangna untuk di bawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal.
- h. Biro perjalanan, badan usaha pelayanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

Daya Tarik wisata merupakan sejatinya kata lain dari objek wisata namun sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009 kata obyek wisata sudah tidak relevan lagi untuk menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan maka digunakan kata “Daya Tarik wisata”. Daya Tarik menurut beberapa ahli; berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, daya Tarik dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan,

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.

Daya Tarik wisata atau “*tourist attraction*” istilah yang lebih sering digunakan, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya Tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu mendefinisikan daya Tarik wisata sebagai sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi atau dilihat. Maka dari itu dapat dilihat bahwa daya Tarik adalah segala sesuatu yang mempunyai daya Tarik, keunikan dan nilai yang tinggi yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu. Suatu daerah untuk menjadi DTW (Daerah Tujuan Wisata) yang harus dikembangkan 3 (tiga) hal agar daerah itu menarik untuk dikunjungi, yaitu:

- a. Adanya *something to see* maksudnya adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat.
- b. Adanya *something to buy* maksudnya adalah sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli.
- c. Adanya *something to do* maksudnya adalah sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu.

Kualitas objek wisata merupakan hal penting dalam pariwisata. Mutu objek daya Tarik wisata yang baik akan berdampak positif pada besaran jumlah wisatawan dan lama tinggal di suatu destinasi wisata. Dalam hal ini persepsi wisatawan yang menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat mutu objek daya Tarik wisata tersebut. Berpendapat bahwa suatu objek wisata harus

meliputi lima unsur penting agar wisatawan merasa puas dalam menikmati perjalanannya.

Peran pemerintah sangat menitikberatkan pada kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga dapat mencukupi seluruh aspek kebutuhan sosial masyarakat. W.S. Sayre dalam Akbar et al (2021) pemerintah sebagai organisasi resmi negara yang menjalankan kekuasaannya. Sementara menurut C. F Strong dalam Akbar et al (2021) pemerintah adalah seseorang yang diberikan hak dalam melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi di dalam dan diluar negara, yang mempunyai kekuatan untuk mengontrol.

Peranan merupakan suatu aspek dari kedudukan atas status karena peranan adalah dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut sebagai status subjektif untuk melakukan suatu fungsi. Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571)“ peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”

Pengembangan pada sector pariwisata sangat penting dijadikan prioritas daerah,karena jika pengembangan pada sector tersebut dilakukan secara maksimal, hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Hasibuan (2011: 69) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Salah satu peran dinas pariwisata dalam pengembangan potensi objek wisata adalah coordinator. Coordinator yang dimaksud adalah mengatur dan

mengkoordinasikan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara mengembangkan potensi objek wisata dengan cara mempromosikan pariwisata dan pemasaran pariwisata.

a. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis yang dimaksud adalah pengetahuan dinas pariwisata terutama pada bidang pengembangan sumber daya manusia dalam menjalankan proses atau prosedur dalam menyangkut pekerjaan (*Rony Ika Setiawan 2016*). Kemampuan pegawai dalam penguasaan metode kerja yang telah ditugaskan. Pemerintah kabupaten pinrang mengelolah wisata pantai lowita bersama pokdarwis.

“Di Dinas Pariwisata belum banyak melakukan peran pada tiap sector wisata, namun kami membantu sebatas promosi pada media sosial, karna dalam bentuk dana kami tidak memberikan” (Bapak H.Adi, Wawancara 16 Agustus 2022)

Pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa dinas pariwisata hanya melakukan peran sebagai saluran promosi pada media sosial resmi yang dimiliki oleh dinas pariwisata. Jika mengacu pada fungsi dinas pariwisata secara umum salah satunya ialah “Pelaksanaan kerjasama antar lintas sector dalam pengelolaan daya Tarik, kawasan wisata”, fungsi tersebut dijalankan bersama sector pemilik wisata yang ada pada wisata pantai lowita dengan memberikan informasi kepada masyarakat dan menunjang ketertarikan wisatawan dalam mengunjungi wisata pantai lowita.

Jika merujuk pada kemampuan teknis yang di sebutkan oleh Hasibuan (2011: 69) penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan

proses yang menyangkut kerja pegawai dalam perusahaan/instansi mengusasi metode kerja yang telah ditugaskan serta bertanggung jawab, menyukai yang berpeluang baik. Sedangkan hasil wawancara dengan informan dinas pariwisata hanya melakukan peranannya untuk wisata Lowita hanya sekedar promosi maka dinas pariwisata masih perlu meningkatkan dan bertanggung jawab dalam melihat peluang yang baik.

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak H.A selaku asisten pemerintahan dan kesra yang menyatakan bahwa:

“berbicara mengenai peranan, kami disini hanya memberikan dampingan kepada instansi terkait baik dari dinas pariwisata, kecamatan, dan desa setempat dalam memberikan arahan dan pengawasan dalam pengembangan wisata pantai lowita. Jadi kami disini tetap mengkoordinir dan melihat apa saja yang perlu dilakukan demi pengembangan wisata pantai yang ada di pinrang terutama untuk pantai lowita. Baik rencana dari dinas pariwisata maupun dari pengelola disana tetap kami memberikan dukungan sebaik dan sebisa mungkin (Bapak H.A pada tanggal 16 Agustus 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam perencanaan pariwisata pantai lowita pemerintah Kabupaten Pinrang hanya memberikan dampingan kepada instansi-instansi terkait baik dari pariwisata dan pemerintah desa dalam memberikan arahan serta promosi melalui akun sosial media resmi Kabupaten Pinrang.

Dalam kaitannya dengan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh pemimpin. Kemampuan teknis adalah pengetahuan tentang metode, proses, prosedur dan teknik untuk melakukan sebuah kegiatan khusus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam keterampilan teknis termaksud pengetahuan mengenai metode, proses, prosedur, serta teknik untuk

melakukan kegiatan yang khusus dari satuan organisasi. Pengembangan wisata yang ada di kabupaten pinrang merupakan tugas yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat beserta masyarakat sekitar tempat wisata. Pengembangan kemampuan teknis yang dimaksud seperti tugas sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat dari berbagai bidang yang dilakukan dengan konsisten. Namun hasil indikator yang memperlihatkan bahwa dinas pariwisata hanya memberdayakan publikasi di sosial media, dalam artian tidak sesuai dengan tupoksi yang ada serta tidak konsisten.

Indikator ini bermaksud bahwa kemampuan teknis adalah proses yang harus di jalankan dengan baik untuk hasil yang maksimal bukan hal instan atau secara tiba-tiba. Kemampuan teknis perlu ditingkatkan dan dilakukan secara *continue* atau tidak mengacu kapan akan dilaksanakan pembukaan event-event saja.

Dari indikator-indikator diatas terkait kemampuan teknis yang dapat disimpulkan dari beberapa komponen dimensi diatas kemampyan teknis pegawai maupun pokdarwis harus tetap dijalankan walupun masih memiliki hambatan, karena hal itu tidak akan terlaksana secara instan namun memerlukan proses yang panjang dan tetap mengedepankan wisata agar menarik daya kunjung wisatawan.

Dalam penyadaran masyarakat sadar wisata, dinas pariwisata seharusnya membuka peluang agar masyarakat sadar wisata dan mendorong untuk aktif pada agenda pelestarian. Hal ini dikarenakan

partisipasi masyarakat dan dapat membantu penanganan masalah yang dihadapi masyarakat desa.

b. Teoritis

Secara teoritis ialah mengidentifikasi secara keseluruhan tujuan sumber daya manusia dalam memperbaiki kontribusi produktif orang-orang terhadap kontribusi dalam suatu organisasi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa orang yang berkontribusi pada dinas pariwisata yang memiliki peranan dalam memberikan edukasi kepada kelompok sadar wisata dalam meningkatkan produktifitas dalam mengelolah wisata pantai lowita.

“langkah yang kami ambil pada pengembangan wisata pantai lowita ialah memberikan pelatihan atau semacamnya salah satunya mengadakan Sapta Pesona. Pada sapta pesona yang kami selenggarakan semuanya menyangkut cara mengedukasi mereka (POKDARWIS) mulai dari kebersihan, keindahan, kerapian dll semuanya kami terapkan disitu” (Bapak H.Adi, Wawancara 16 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata berkontribusi dalam mengedukasi semua pokdarwis yang ada.

Menurut Hasibuan (2007) teoritis merupakan setiap pegawai yang bekerja dengan menjual tenaga (fisik dan pikiran) kepada perusahaan/instansi dan sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan bahwa teoritis menurut Hasibuan (2007) merupakan suatu hal pokok yang menjadi tujuan utama karena menjalankan tugas sesuai dengan perjanjian baik dalam instasi maupun kepada pokdarwis harus turut serta dalam acara

yang dilaksanakan agar dapat terlasana maksimal dan dapat meminimalisir bentuk kesalahan yang ada.

c. Konseptual

Dapat dijelaskan bahwa konseptual ialah suatu hal yang telah tersusun secara terperinci dengan memiliki rencana yang matang, latar belakang yang jelas serta memiliki tujuan yang jelas ([Laeli Nur Azizah 2011](#)). Dalam hal ini dinas pariwisata harus memiliki rencana yang matang bersama pokdarwis untuk menjadikan wisata yang pada daerahnya menjadi unggul dan diminati oleh wisatawan lokal maupun manca negara.

“salah satu cara dalam upaya meningkatkan daya tarik wisata kami ialah memberika memanfaatkan SDA yang telah ada dan di kelolah bersama masyarakat setempat untuk menjadi lebih baik, lebih menarik dalam hal ini menarik wisatawan dalam berkunjung ke wisata yang telah kami sajikan dengan senyaman mungkin.langkah tersebut yang kami ambil membuktikan bawah kami bisa masuk sebagai 100 besar wisata yang ada di Indonesia sesuai yang diselenggarakan oleh bapak menteri yaitu pada ajang ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) (Bapak H.Asdar, Wawancara 18Agustus 2022).

Pada dasarnya kebijakan serta aturan yang dibuat pada dinas pariwisata sebagian besar dari penduduk asli wisata pantai lotiwa tidak memperdulikan hal tersebut dan hal itu menjadi salah satu bagian yang menjadi penghambat dalam proses pengembangan wisata. Jika mengacu pada salah satu jurnal yang juga membahas secara terperinci masalah pariwisata dalam hal pengembangan kewenangan otonomi daerah akan di tentukan oleh beberapa factor, salah satu factor diantaranya ialah “kualitas sumber daya manusia sebagai kunci industri pariwisata dan di kembangkan oleh sumber daya manusia di berbagai subsistem pariwisata.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata terutama setelah Indonesia mengembangkan kebijakan otonomi daerah”(Qisthi and Sosial, 2021).

Dari indikator tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh perannannya dalam meningkatkan kualitas wisata sehingga hal tersebut berkembang sesuai yang diinginkan dan dapat meningkatkan wisatawan untuk berkunjung.

“secara khusus kami memiliki program khusus karena mereka disana memiliki salah satu konservasi penyu yang menjadi daya Tarik wisatawan yang tidak dimiliki oleh wisata-wisata yang lain pada kabupaten pinrang. Makanya kami merangkul mereka agar tetap memberdayakan hal itu. Karena tak dapat dipungkiri adanya konservasi penyu pada pantai lowita membawa dampak yang besar pada pantai lowita, biasanya wisatawan padat karena adanya acara atau event kecil yang mereka adakan yaitu pelepasan bayi penyu pada pantai menjadi minat masyarakat” (Bapak H.Adi, Wawancara 16 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti beranggapan bahwa program yang dinas pariwisata buat dalam hal ini untuk mengembangkan potensi masyarakat dinas pariwisata sudah maksimal. Hal ini di dukung oleh adanya kepekaan dinas dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar pantai lowita dalam hal ini menyangkut pengembangan pariwisata dinas tetap merangkul dan mendukung penuh masyarakat salah satu yang mereka lakukan adalah mempromosikan pada media sosial resmi mereka yang secara tidak langsung memberitahukan kepada khalayak luas bahwa sanya adanya acara yang diselenggarakan pada pantai lowita tersebut.

Menurut Pendit, 2004 industri pariwisata di Indonesia masih

menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, sekaligus merupakan salah satu factor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara.

Daya Tarik wisata (*tourism industry 2016*) adalah komponen utama dari suatu destinasi, sedangkan komponen-komponen lainnya yang tergabung. Daya Tarik wisata adalah objek berbasis sumber daya alam maupun budaya yang memiliki nilai-nilai yang menari perhatian pengunjung.

Dari indikator tersebut dapat disimpulkan memang wisata memang harus memiliki suatu daya Tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung baik wisata alam maupun budaya yang di perkenalkan secara meluas, pantai lowita memiliki daya Tarik baik dari alam yang indah dan memiliki salah satu konservasi penyu yang dimana dapat kita ketahui bersama bahwa sanya populasi penyu yang ada di Indonesia kian menurun, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan wisatawan mengunjungi pantai lowita.

2. Kompetensi

Pada dasarnya instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan harus dilandasi dengan keterampilan serta pengetahuan dan didukung oleh sikap yang dituntut oleh pekerjaan.

Pariwisata merupakan kegiatan dapat dipahami dari banyak pendekatan. Dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.

- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta adalah berbagai macam kegiatan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.
- d. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta, multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, daerah dan pengusaha.
- e. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- g. Industry pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kepariwisataaan mendefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah,

pemerintah daerah dan pengusaha. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Revisi dari UU No.9 Tahun Kepariwisata)).

Presiden Soekarno Indonesia mendefinisikan dalam suatu percakapan sebagai pancadanya dari istilah asing *tourism* “arti pariwisata adalah ialah bahwa kalau semua kegiatan itu dianggap gagal”. Tanda adanya wisatawan semua kegiatan pembangunan hotel, persediaan angkutan dan sebagainya itu tidak memiliki makna kepariwisataan. Setiap usaha pariwisata yang ada, membutuhkansebrbagai sarana yang memadai untuk menunjang kebutuhan para wisatawan, yaitu salah satunya adalah sarana akomodasi. Karena tanpa adanya sarana akomodasi yang memadai, usaha pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik dan begitupun sebaliknya tanpa kegiatan –ariwisata usaha akomodasi tidak akan berjalan secara optimal. Diatnra bermacam-macam bentuk jasa kepariwisataan yang terpenting dan terlengkap ialah yang bisanya disebut hotel atau penginapan untuk wisatawan. Keseluruhan kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan terdapat tiga potensi kepariwisataan, yaitu:

- a. Modal dan potensi alam.
- b. Modal potensi dan kebudayaan
- c. Modal dan potensi manusia.

Pariwisata menurut undang-undang No.10 tahun 2019 pariwisata memerlukan pemandu wisata yang berperan penting dalam sebuah perjalanan wisata pemandu wisata merupakan orang membawa wisatawan untuk melakukan kunjungan (ekskursi) dalam jangka waktu tertentu pariwisata adalah pelancongan (*Kementrian Pariwisata RI, Rencana Strategis Pengembangna Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019 (Jakarta, Kemanpar RI,2015)*).

a. Pekerja Efektif

Pada dasarnya pekerja efektif adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi keterampilan (*George Klemp dalam Yohny, Imas 2017*), keterampilan yang dimaksud adalah pekerjaan yang sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan atau yang diterapkan pada dinas pariwisata kabupaten pinrang. Dinas kabupaten pinrang menerapkan kebijakan dan tindak lanjut pada tiap-tiap bidang, salah satu bidang yang menjadi penggerak dari kebijakan yang telah disepakit adalah bidang sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah asset (capital). Dinas pariwisata yang memiliki memiliki bidang sumber daya manusia harus berkualitas memperhatikan kompetensi dan motivasi agar kerja kelompok sadar wisata dalam menyadarkan pengelola dan pemilik wisata yang ada pada pantai lowita dilakukan secara optimal.

“yang kami lakukan dalam menyadarkan kelompok sadar wisata kami memberikan pelatihan kepada mereka, melalui bimtek dan kami lakukan hal itu antara bulan Oktober atau pada bulan November dalam setahun setelah kami memberilan pelatihan pada

semua pokdarwis yang ada di kabupaten pinrang biasanya tiap tiga bulan sekali kami melakukan evaluasi kepada mereka yang biasanya kami mengadakan semacam kunjungan ke secretariat mereka masing-masing, atauka kami memusatkan triwulannya di dinas pariwisata itu sendiri” ”(Bapak H.Adi, Wawancara 16 Agustus 2022).

Bila pekerja yang bergerak di industry pariwisata terhadap unsur dan indikator budaya kerja, niscaya akan berpengaruh besar dalam pengelolaan sector pariwisata itu sendiri, dan dapat melabungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (*Mukti Diapepin 2019*). Sedangkan menurut Steers (2011) efektivitas pekerja dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok/pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang di inginkan.

Dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa ptugas pokok dinas pariwisata telah terealisasikan dengan baik namun masih perlu untuk dikembangkan lagi atau menambah minimal bimtek yang dilakukan 3 kali setahun untuk hasil yang lebih maksimal lagi dari pokdarwis.

Bimbingan teknis yang biasanya diberikan dinas pariwisata pada kelompok sadar wisata yang dilakukan sekali setahun pada akhir tahun, menjadi ajang bagi kelompok sadar wisata yang tercatat di dinas pariwisata dalam meningkatkan wisata pada masing-masing daerah dan tetap dibawah pengawasan.

“bimtek yang di selenggarakan dinas pariwisata kepada pokdarwis menurut saya masih kurang efesien, bimtek yang mereka sajikan hanyalah teori yang masih minim tindakan yang kami dapat, dan hal ini terus di evaluasi kepada mereka namun juga minim dalam memberikan dukungan baik dalam bentuk materi. Yang mereka berikan selama ini support sepenuhnya dalam kami berkreativitas selama memberikan dampak yang positif kepada daerah, karena

mengembangkan SDM kami itu adalah hak kami sebagai warga setempat.” (Bapak H. Taling *perwalikan pokdarwis pantai lowita*, wawancara 21 Agustus 2022).

Bimbingan teknis (BIMTEK) adalah kegiatan pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan pariwisata, wisata dan kepariwisataan.

Menurut informan kurang efesienya bimtek yang diselenggarakan oleh dinas pariwisata berdampak pada pengembangan sumber daya manusia yang akan kami benahi, hal ini karena kurangnya edukasi kepada pokdarwis dari dinas. Kelompok sadar wisata adalah lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa mereka serta mewujudkan Sapta Pesona. Kepariwisata diharapkan bakal meningkatkan pendapat daerah dan meningkatkan pembangunan daerah serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa. Pokdarwis bergerak secara swadaya yang artinya pengembangan kepariwisataan yang dilakukan di desa bersumber dari kekuatan desa sendiri dengan segala potensinya. Pokdarwis juga harus menciptakan pengembangan berdasarkan potensi kreativitas yang mereka miliki karena merekalah yang memiliki kuasa atas pengembangan desa dengan segala sumber daya yang mereka miliki.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa peran kelompok sadar wisata pada suatu pengembangan wisata merupakan peranan yang sangat penting dalam membantu dinas pariwisata dalam peningkatan pendapatan daerah

dan pengimplementasian kebijakan.

“struktur kelompok kami masih belum ada secara resmi, namun kami tetap turut berdampak bersama baik pada lokasi wisata maupun ketika ada pertemuan yang diselenggarakan oleh dinas pariwisata setempat. Selain menjadi salah satu anggota pokdarwis pantai lowita hal ini juga menjadi hobi saya. Jadi saya bergabung dengan pokdarwis karena keinginan sendiri dan pada saat itu pokdarwis pantai lowita baru terbentuk jadi minim anggota, namun sekarang anggota kami lebih dari cukup dan bisa saling mengandalkan satu sama lain dalam memberikan infotmasi kepada masyarakat setempat/pelayan wisatawan.” (Bapak H. Taking *perwalikan pokdarwis pantai lowita*, wawancara 21 Agustus 2022).

Dari yang dikatakan oleh informan, pada dasarnya untuk menjadi salah satu anggota dari kelompok sadar wisata pada pantai lowita tidak terlalu mementingkan syarat apapun untuk bergabung menjadi salah satu anggota mereka, melainkan harus memiliki kesadaran akan pentingnya pengembangan wisata yang ada di daerah tersebut dan memiliki rasa kepekaan akan kunjungan wisatawan menjadi hal yang ditingkatkan tiap tahunnya. Kemampuan dinas pariwisata dalam menganyomi kelompok sadar wisata yang ada di kabupaten pinrang masih minim dan masih perlu diperkuat dalam mengedukasi.

Menurut Rahim Firmansya 2012 mengatakan bahwa penguatan dan peningkatan kapasitas peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku penting unuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan berkelanjutan.

Dari pemaparan diatas pokdarwis pantai lowita memegang kendali untuk mengembangkan wisatanya namun tetap membutuhkan arahan

maupun uluran tangan dinas pariwisata setempat, untuk tetap aktif dalam mengembangkan serta peningkatan kapasitas kepariwisataan tetap berlanjut.

b. Kinerja Unggul

Kinerja unggul adalah ukuran keberhasilan dimana seseorang karyawan berhasil membebaskan serta memaksimalkan setiap endapan kemampuan, kompetensi, bakat, keterampilan serta kekuatan di perusahaan dimana seseorang bekerja (*Rudi Hartono 2010*). Kinerja unggul adalah ukuran keberhasilan dalam melaksanakan suatu strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Kinerja unggul saama dengan menggambarkan kepemimpinan pribadi seseorang maupun kepemimpinan dalam berorganiasi. Hal ini tidak dapat di pungkiri bahwa sanya kepemimpinan adalah suatu tindakan pribadi para pemimpin senior organisasi pemerintah memandu dan mempertahankan keberlannjut organisasi pemerintah. Selain itu juga, bagaimana para pemimin senior berkomunikasi dengan para sumber daya manusia, mengembangkan masa depan para pemimpin dan menciptakan suaut lingkungan organisasi pemerintah yang mendorong perilaku etis mematuhi hukum. Tanggung jawab sosial dan mendukung komunikasi.

Perencanaan strategi adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk satu maksud yaitu menolong organisasi penerintah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta nilai-nilai organisasi pemerintah memlalui proses pengamatan lingkungan secaran komprehensif, sistematis, posedural dan

terukur melalui serangkaian aktivitas dari yang paling strategis hingga operasional guna mencapai keunggulan bersaing di masa depan.

Organisasi pemerintah yang unggul adalah yang memiliki tujuan jelas berdasarkan visi dan misi yang disepakati oleh para pendirinya. Untuk mencapai tujuan dibutuhkan cara untuk mencapainya yang disebut strategis. Strategis sendiri menekankan pada apa upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menyadari terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya disusun rencana (plan), seperangkat kebijakan (policies), terhadap tahapan pencapaian, organisasi pemerintah dan personalia yang mengisi anggaran dan program aksi. Kategori perencanaan strategis menggambarkan bagaimana organisasi pemerintah mengembangkan sasaran strategis dan rencana kerja yang kemudian disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi pemerintah dan diubah jika situasi mengharuskan serta bagaimana kemajuannya diukur.

“strategi yang saya bangun adalah membentuk pokdarwis dan memberikan mereka pemahaman dan bimtek dalam pengembangan wisata di daerah masing-masing. Mereka saya kukuhkan pada bulan November tahun 2021 di salah satu wisata pantai yaitu Pantai Lawere dan mengejar seluruh pokdarwis untuk mendukung usaha pariwisata yang ada di kabupaten pinrang ini, dan memberikan pesan untuk tetap solid dan proaktif dalam mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Bimtek yang baru-baru ini kami selenggarakan di salah satu room hotel di kabupaten pinrang mengangkat tema “Destinasi wisata di kabupaten pinrang akan ramai dikunjungi oleh wisatawan”. Di samping itu salah satu strategi kami akan galakkan Forum Group Discussion (FGD) untuk saling bertukar informasi antar pokdarwis, pelaku usaha pariwisata dan juga pihak dinas pariwisata provinsi maupun kabupaten pinrang” (Bapak H. A. Sayuti, *Kepala Dinas PASPOR*, wawancara 11 Agustus 2022).

Adapun capaian kinerja indikator ini rata-rata melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya yaitu diatas 100%. Pada tahun 2021 dua objek wisata yang dikembangkan tersebut adalah Pantai Lowita di Kecamatan Suppa dan Pantai Harapan Ammani di Kecamatan Mattiro Sompe. Pengembangan dua objek wisata ini terbukti mampu memberikan kontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pinrang di tahun 2021, sebagaimana tergambar pada grafik berikut:



Gambar 7 PeNingkatan Jumlah PeNgunjung Wisatawan

Pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari factor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian antara lain adalah:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata telah direncanakan dengan baik.
2. Dukungan anggaran dan sumber daya manusia cukup walaupun jumlahnya belum sesuai harapan.
3. Adanya hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan para stakeholder kepariwisataan seperti pengusaha pengelola objek wisata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dinas pariwisata dalam pengembangan kompetensi masyarakat sadar wisata pantai lowita telah dilakukan secara maksimal dan dengan tugas pokok serta sesuai dengan kebijakan yang ada. Dan pemerintah yakni dinas pariwisata mempunyai tanggung jawab terkait pengembangan wisata yang ada di kabupaten pinrang.
2. Strategi yang dilakukan oleh dinas pariwisata kabupaten pinrang telah maksimal salah satunya mengadakan suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh dinas pariwisata dimana melibatkan semua kelompok sadar wisata yang ada di kabupaten pinrang. Sehingga meningkatkan partisipasi kelompok sadar wisata dan semua masyarakat sekitar wisata untuk ikut terlibat dalam dan peningkatan daya Tarik pengunjung di wisata. Disini motivasi yang dilakukan dinas pariwisata dengan cara bersosialisasi mengenai program peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang mengenai Peran Dinas Pariwisata Pada Pengembangan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Peran dinas pariwisata dalam pengembangan kompetensi masyarakat sadar wisata masih perlu ditingkatkan sehingga menambah optimalisasi pengembangan wisata sehingga bisa masuk pada kategori Desa Wisata sesuai dengan yang diharapkan oleh kementerian pariwisata ekonomi kreatif.
2. Strategi yang dilakukan telah maksimal namun masih perlu ditingkatkan lagi agar wisata yang pantai lowita bisa masuk sebagai salah satu desa wisata tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kategori kementrai pariwisata dan ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Anderson, J. E. (2014). *Public Policy Making*. Cengage Learning.
- Cornelis, C. A. E., Fanggidae, A. H. J., & Timuneno, T. (2019). Strategi Pengembangan Objek Wisata Alam Gunung Fatuleu. *JOURNAL OF MANAGEMENT Small and Medium Entreprises (SME's)*, 8(1), 117–132.
- Damardjati. (2005). *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darwin, M. (1998). *Implementasi Kebijakan. Modul Kursus TMPP*. MAPUGM, Yogyakarta.
- DINPAR Pirang. (2019). Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang 2019 – 2024. Retrieved June 16, 2022, from https://drive.google.com/file/d/19IMD3dom1WGAbsezrVzT1ry0J7L03NtV/view?usp=drive_open
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. Michigan : Prentice Hall.
- Handyaningrat, S. (1983). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian: dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Graha Ilmu.
- Islamy, M. I. (2001). *Policy Analysis: Seri Monografi Kebijakan Publik*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Ki Hajar, D. (1994). *Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Komaruddin. (1996). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Kusworo, H. A., & Damanik, J. (2002). Pengembangan SDM pariwisata daerah: Agenda kebijakan untuk pembuat kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 105–120.

- Malinowski, B. (1994). The problem of meaning in primitive languages. *Language and Literacy in Social Practice: A Reader*, 1–10.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, D., & Suyanto, B. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Indonesia. (1992). *Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46607/uu-no-14-tahun-1992>
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pendit, N. S. (1999). Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Penerbit, PT. In *Anem Kosong Anem*. Jakarta: Anem Kosong Anem.
- Pendit, P. L. (2010). Perpustakaan Digital: Kesenambungan dan Dinamika. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 10(1), 59–61.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1995). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Rakhmat, J. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Romi, A. M. (2020). *Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Bahari di Kabupaten Bone*. Universitas Hasanuddin.
- Roth, L. M. (2004). The social psychology of tokenism: Status and homophily processes on Wall Street. *Sociological Perspectives*, 47(2), 189–214.
- Said, A. R. A. (2020). Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan. Retrieved June 18, 2022, from https://www.academia.edu/15535345/Pemerintahan_dan_sistem_pemerintahan
- Samodra, W. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

- Sedarmayanti, H. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Reflika Aditama.
- Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. (1994). *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Strong, C. F. (2011). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media.
- Subarsono, A. G. (2005). Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif, dan Non-Partisan. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, A. (2012). *Penelitian Kausalitas Komparatif*. Surabaya: Elearning UNESA.
- Thoha, M. (2004). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Penerbit PT*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarto, B. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses, cet. ke-2. In *Buku Kita*. Jakarta: Buku Kita.
- Wulansari, D. (2009). Sosiologi (Konsep dan Teori). In *Refika Aditama*. Bandung: Refika Aditama.
- Yoeti, O. A. (1996). *Pemasaran pariwisata*. Bandung: Angkasa.



Lampian 1 Foto Lokasi Penelitian



Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Lampian 2 Dokumentasi Wawancara dengan Informan

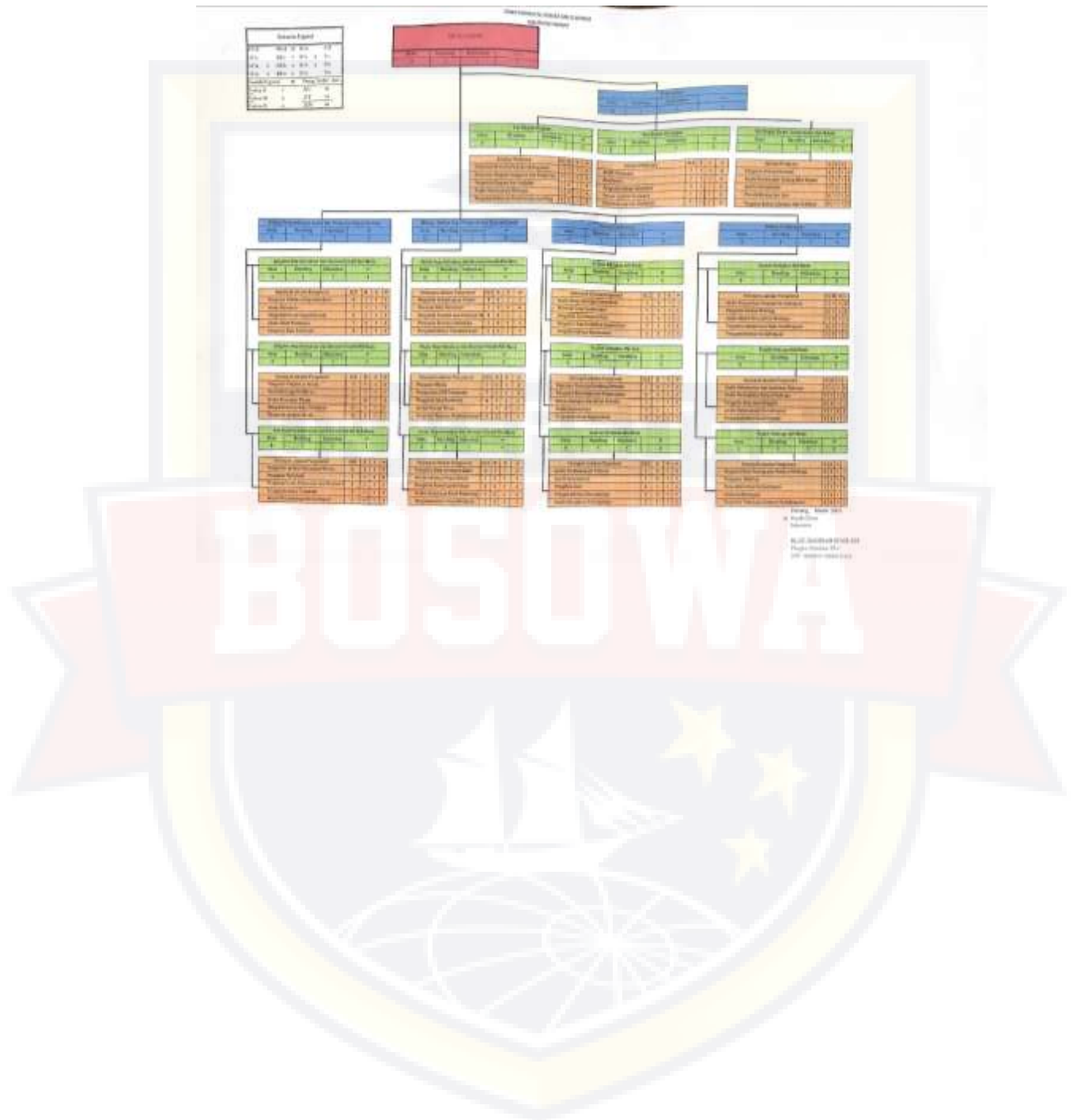


Bersama Bapak Kepala Bidang SDM Dinas Pariwisata



Bersama Bapak Kepala Seksi Bidang Pengembangan SDM

Lampiran 3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga



Lampiran 4 Foto Lokasi Konservasi Penyu pantai lowita



Lampiran 5 Foto Bersama Perwakilan Pokdarwis



Lampiran 7 Foto Izin Melakukan Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.398/FSP/UNIBOS/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di-
Kabupaten Pinrang

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ade Safitri
NIM : 4518021050
Judul penelitian : Peran Dinas Pariwisata Pada Pengembangan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang
Tempat : Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Waktu : Agustus 2022

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 01 Agustus 2022
Dekan Fisip Unibos,



Dr. A. Burcharduddin, S.Sos., M.Si
NIDN : 0905107005

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan : Bintang No. 5 Telp. (0421) 923 906

SURAT KETERANGAN

Nomor : 430/235/ DISPASPOR/ X /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI SUYUTI, ST,M.Si
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat.I / IV.b
NIP : 19680115 200312 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADE SAFITRI
NIM : 451 802 1050
Asal Perg.Tinggi : Universitas Bosowa Makassar
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Pallameang Pasar Mattiro Sompe
No.Hp /Wa : 085 394 236 253

Telah Melakukan Penelitian dari tanggal 8 Agustus 2022 s/d 20 Agustus 2022 Sebagai Bahan Untuk Penyusunan Skripsi Pedidikan Strata Satu (SI) di Pantai Lowita Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Dengan Judul **"PERAN PARIWISATA PADA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KELOMPOK SADAR WISATA PANTAI LOWITA DI KABUPATEN PINRANG"**

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 03 Oktober 2022

ANDI SUYUTI, ST., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat.I
NIP : 19680115 200312 1 006

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0425/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-08-2022 atas nama ASE SAFITRI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1070/RT.Teknis/DPMPPTSP/08/2022, Tanggal : 08-08-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0425/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2022, Tanggal : 08-08-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2. Alamat Lembaga	: JL. URIP SUMOHARJO KM. 4
3. Nama Peneliti	: ASE SAFITRI
4. Judul Penelitian	: PERAN PARIWISATA PADA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KELOMPOK SADAR WISATA PANTAI LOWITA DI KAB. PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: UNTUK MENGETAHUI PERANAN DINAS PARIWISATA PADA WISATA PANTAI LOWITA
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitlu

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-02-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketuntasan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Agustus 2022

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E